



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 760 TAHUN 2025

TENTANG

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL, TERMINAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, TERMINAL PELAYARAN RAKYAT DAN WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan, terminal yang dimiliki dan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa demi meningkatkan ketahanan konektivitas, sebagai ciri khas kewilayahan, memberdayakan ekonomi rakyat dalam usaha skala kecil dan menengah, dan memelihara warisan budaya bangsa, maka diperlukan kebijakan afirmatif untuk pemberdayaan angkutan laut Pelayaran Rakyat berupa pembangunan dan/atau pengoperasian terminal kepada Pelayaran Rakyat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki fasilitas pelabuhan, melakukan kerja sama penyediaan fasilitas pelabuhan dan melakukan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian Terminal Pelayaran Rakyat yang tersebar pada Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Pelabuhan Pengumpan Regional, Terminal Angkutan Penyeberangan, Terminal Pelayaran Rakyat dan Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d

perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6643);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Pelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 799);
12. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpulan Regional di Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 993);

- Memperhatikan :**
1. Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 523.43/834/DISHUB-SET/2022 Tanggal 31 Maret 2022 Perihal : Revisi Usulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pada Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang Nomor : AL.308/2/6/KSOP.KJG/2024 Tanggal 18 September 2024 Perihal : Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pada Terminal Kapal Pelayaran Rakyat di Wilayah Kijang;

4. Rekomendasi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Nomor : UM.002/3/1/KSOP.TPI/2024 Tanggal 19 Februari 2025 Perihal : Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pada Terminal Kapal Pelayaran Rakyat;
5. Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : B/184/552.3/IX/2024 Tanggal 15 September 2024 Perihal : Rekomendasi Penetapan Terminal Pelayaran Rakyat Wilayah Kijang;
6. Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : B/40/500.11.16.3/II/2025 Tanggal 20 Februari 2025 Perihal : Usulan Penetapan Terminal Pelayaran Rakyat;
7. Rekomendasi Pemerintah Kota Tanjungpinang Nomor : 552.3/77/5.5.04/2025 Tanggal 25 Maret 2025 Perihal : Permohonan Penetapan Terminal Kapal Pelayaran Rakyat di Tanjungpinang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelabuhan Pengumpulan Regional, Terminal Angkutan Penyeberangan, Terminal Pelayaran Rakyat dan Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Pelabuhan Pengumpulan Regional, Terminal Angkutan Penyeberangan, Terminal Pelayaran Rakyat dan Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelabuhan Pengumpulan Regional, Terminal Angkutan Penyeberangan, dan Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Terminal Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA** : Pelabuhan Pengumpulan Regional, Terminal Angkutan Penyeberangan, Terminal Pelayaran Rakyat dan Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan pengelolaan aset pelabuhan.

KEENAM : Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Pelabuhan sesuai wilayah kerja juga melaksanakan fungsi sebagai Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan Aset yang tercatat di pelabuhan dan terminal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 JUNI 2025



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
6. Wali Kota Tanjungpinang di Senggarang;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
11. Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di Tanjungpinang;
12. Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang di Kijang;
13. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban di Tanjung Uban;
14. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Wilayah I Kota Batam di Batam;
15. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
16. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan di Tanjungpinang;
17. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas di Natuna;
18. Kepala Unit Penyelenggara Daerah V Kabupaten Lingga di Lingga.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 760 TAHUN 2025
 Tanggal : 30 JUNI 2025

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL, TERMINAL ANGKUTAN PENYEGERANGAN, TERMINAL PELAYARAN RAKYAT DAN WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	PELABUHAN	LINTANG	BUJUR	PELAKSANA FUNGSI PEMERINTAHAN		KETERANGAN
						PENYELENGGARA PELABUHAN	SYAHBANDAR	
1	Batam	Bengkong	Bengkong	1° 9'45.22"U	104° 3'34.59"T	UPPD Wilayah I Kota Batam	KSOP Khusus Batam	Proses Pembangunan
2	Batam	Galang	Sijantung	0°46'39.50"U	104°10'56.54"T	UPPD Wilayah I Kota Batam	KSOP Khusus Batam	Operasional/Milik Pemprov
3	Tanjungpinang	Tanjungpinang Kota	Kuala Riau	0°56'4.22"U	104°26'36.70"T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas II Tanjung pinang	Operasional/Milik Pemprov
4	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Dompak	0°53'7.46"U	104°26'59.21"T	KSOP Kelas II Tanjung pinang	KSOP Kelas II Tanjung pinang	Operasional/Milik Pemprov
5	Bintan	Bintan Utara	Kota Segara	1° 3'32.65"U	104°13'13.16"T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	UPP Kelas I Tanjung Uban	Operasional/Milik Pemprov
6	Bintan	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	1° 0'58.83"U	104°13'55.59"T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	UPP Kelas I Tanjung Uban	Tidak Beroperasi/Milik Pemprov
7	Lingga	Lingga Utara	Sei Tenam	0° 0'23.11"S	104°30'26.81"T	UPPD Daerah V Kabupaten Lingga	UPP Kelas III Senayang	Beroperasi/Milik Pemprov

8	Lingga	Singkep	Dabo	0°30'3.68"S	104°33'56.00"T	UPPD Daerah V Kabupaten Lingga	UPP Kelas III Dabo Singkep	Beroperasi/ Milik Pemprov
9	Kepulauan Anambas	Jemaja	Letung	2°59'19.72"U	105°41'49.00"T	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	Beroperasi/ Milik Pemprov
10	Kepulauan Anambas	Jemaja	Kuala Maras	2°54'21.63"U	105°48'48.64"T	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	Beroperasi/ Milik Pemprov
11	Natuna	Bunguran Timur	Ranai	3°53'31.48"U	108°23'30.33"T	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	Beroperasi/ Milik Pemprov
12	Natuna	Bunguran Barat	Sedanau	3°47'47.87"U	108° 2'20.28"T	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	Beroperasi/ Milik Pemprov
13	Natuna	Midai	Midai	3° 0'8.01"U	107°44'49.35"T	UPP Kelas II Tarempa	UPP Kelas II Tarempa	Beroperasi/ Milik Kementerian Perhubungan
14	Natuna	Bunguran Utara	Kelarik	3°59'2.39"U	107°59'19.29"T	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	Rencana Lokasi/ Proses Pembangunan
15	Natuna	Bunguran Utara	Teluk Buton	4°13'43.15"U	108°12'53.97"T	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	Rencana Lokasi/ Proses Pembangunan

II. TERMINAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	PELAHUAN	LINTANG	BUJUR	PELAKSANA FUNGSI PEMERINTAHAN		KETERANGAN
						PENYELENGGARA PELABUHAN	SYAHBANDAR	
1	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Penyeberangan Dompak	0°52'2.15"U	104°28'59.06"T	UPPD Wilayah I Kota Batam	BPTD Kepulauan Riau	Beroperasi/Milik Kementerian Perhubungan
2	Bintan	Bintan Utara	Penyeberangan Tanjung Uban	1° 3'42.17"U	104°13'10.06"T	PT. ASDP (Persero)	BPTD Kepulauan Riau	Beroperasi/Milik Kementerian Perhubungan
3	Batam	Nongsa	Penyeberangan Telaga Punggur	1° 1'59.11"U	104° 7'53.13"T	PT. ASDP (Persero)	PT. ASDP (Persero)	Beroperasi
4	Karimun	Kundur Utara	Penyeberangan Selat Belia	0°53'50.78"U	103°22'34.85"T	UPPD Wilayah II Tanjung Balai Karimun	BPTD Kepulauan Riau	Beroperasi/Milik Kementerian Perhubungan
5	Kepulauan Anambas	Kute Siantan	Matak	3°19'31.90"U	106°14'25.99"T	BPTD Kepulauan Riau	BPTD Kepulauan Riau	Beroperasi/Milik Kementerian Perhubungan
6	Kepulauan Anambas	Jemaja	Penyeberangan Letung	2°54'22.63"U	105°48'49.60"T	BPTD Kepulauan Riau	BPTD Kepulauan Riau	Beroperasi/Milik Kementerian Perhubungan
7	Lingga	Singkep Barat	Jagoh	0°20'27.81"S	104°27'55.46"T	UPPD Kabupaten Lingga	BPTD Kepulauan Riau	Beroperasi/Milik Kementerian Perhubungan
8	Lingga	Lingga	Penarik	0°16'28.69"S	104°31'13.69"T	UPPD Kabupaten Lingga	BPTD Kepulauan Riau	Beroperasi/Milik Kementerian Perhubungan

9	Natuna	Bunguran Barat	Penyeberangan Sedanau	3°47'47.87"U	108°2'20.28"T	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPPD Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	Beroperasi
10	Natuna	Bunguran Timur	Penyeberangan Penagi Ranai	3°53'31.48"U	108°23'30.33"T	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	BPTD Kepulauan Riau	Beroperasi/Milik Kementerian Perhubungan

III. TERMINAL PELAYARAN RAKYAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	PELABUHAN	LINTANG	BUJUR	PELAKSANA FUNGSI PEMERINTAHAN		KETERANGAN
						PENYELENGGARA PELABUHAN	SYAHBANDAR	
1	Bintan	Bintan Timur	Terminal Pelayaran Rakyat Salikin	00°51'05,9" U	104°36'40,3" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas III Kijang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2	Bintan	Bintan Timur	Terminal Pelayaran Rakyat Songku	00°51'13,4" U	104°36'39,6" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas III Kijang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

3	Bintan	Bintan Timur	Terminal Pelayaran Rakyat Eksong	00°51'03,7" U	104°36'39,6" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas III Kijang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
4	Bintan	Bintan Timur	Terminal Pelayaran Rakyat Apnal Joni	00°51'10,2" U	104°36'40,2" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas III Kijang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
5	Bintan	Bintan Timur	Terminal Pelayaran Rakyat Apeng (Candra) / Jeky	00°49'26,0" U	104°36'06,4" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas III Kijang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi
6	Bintan	Bintan Timur	Terminal Pelayaran Rakyat Tomy	00°49'50,0" U	104°36'06,4" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas III Kijang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
7	Bintan	Bintan Timur	Terminal Pelayaran Rakyat Chuyang	00°45'07,7" U	104°36'09,6" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas III Kijang	Beroperasi / KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
8	Bintan	Bintan Timur	Terminal Pelayaran Rakyat Asi/Maiwan	00°49'56,6" U	104°36'39,4" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas III Kijang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

9	Bintan	Bintan Timur	Terminal Pelayaran Rakyat Niki Chandra	00°49'95,4"U	104°35'52,5"T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas III Kijang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
10	Bintan	Bintan Timur	Terminal Pelayaran Rakyat Pak Kadir	00°49'59,9"U	104°35'50,7"T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas III Kijang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
11	Bintan	Desa Toapaya Asri Kecamatan Toapaya	Terminal Pelayaran Rakyat PT. Nik Indo Jaya	00°58'26" U	104°31'30" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas II Tanjungpinang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
12	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Terminal Pelayaran Rakyat Kampung Kolam	00°55'58"U	104°26'58" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas II Tanjungpinang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
13	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Terminal Pelayaran Rakyat PT. Putra Dompak Berjaya	00°52'30"U	104°29'32" T	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas II Tanjungpinang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
14	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Terminal Pelayaran Rakyat Sei Jang	00°53'51"U	104°28'12" T	Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	KSOP Kelas II Tanjungpinang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

15	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Terminal Pelayaran Rakyat Tanjung Unggat	00°55'35"U	104°28'05" T	Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	KSOP Kelas II Tanjungpinang	Beroperasi/ KSOP dengan UPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
----	---------------	---------------	--	------------	--------------	---	--------------------------------	--

IV. WILAYAH TERENTU DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	KABUPATEN/KOTA	LOKASI	PELAKSANA FUNGSI PEMERINTAHAN		TITIK	BATAS-BATAS TITIK KOORDINAT	
			PENYELENGGARA PELABUHAN	SYAHBANDAR		LINTANG	BUJUR
1	Batam	Perairan Pulau Nipah	UPT Wilayah I Kota Batam	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	1	1° 07' 00" U	103° 33' 05" T
					2	1° 06' 10" U	103° 34' 34" T
					3	1° 06' 45" U	103° 35' 02" T
					4	1° 04' 28" U	103° 38' 48" T
					5	1° 05' 22" U	103° 40' 49" T
					6	1° 04' 55" U	103° 41' 04" T
					7	1° 05' 44" U	103° 42' 49" T
					8	1° 06' 32" U	103° 42' 27" T
					9	1° 06' 16" U	103° 42' 00" T
					10	1° 08' 16" U	103° 40' 43" T
					11	1° 07' 35" U	103° 39' 30" T
					12	1° 09' 05" U	103° 38' 43" T
					13	1° 10' 17" U	103° 38' 43" T
					14	1° 10' 14" U	103° 35' 19" T
					15	1° 09' 35" U	103° 35' 19" T
					16	1° 09' 27" U	103° 34' 42" T

2	Batam	Perairan Batu Ampar	BP KPBPB Batam	KSOP Khusus Batam	1 2 3 4 5 6 7	1° 10' 09" U 1° 10' 17" U 1° 10' 16" U 1° 11' 39" U 1° 12' 30" U 1° 11' 41" U 1° 10' 30" U	103° 55' 27" T 103° 56' 24" T 103° 58' 33" T 103° 59' 46" T 103° 59' 46" T 103° 57' 39" T 103° 55' 26" T
3	Batam	Perairan Kabil Selat Riau	UPT Wilayah I Kota Batam	KSOP Khusus Batam	1 2 3 4 5 6 7 8	1° 08' 15,72" U 1° 08' 15,73" U 1° 06' 37,24" U 1° 06' 11,54" U 1° 05' 15,55"U 1° 04' 58,77" U 1° 04' 55,39" U 1° 04' 16,73" U	104°11'41,52" T 104°11'08,65" T 104°09'55,43" T 104°09'36,36" T 104°09'22,62" T 104°09'21,10" T 104°10'24,79" T 104°11'24,80" T
4	Batam	Perairan Galang	UPT Wilayah I Kota Batam	KSOP Khusus Batam	1 2 3 4	0° 44' 18" U 0° 44' 47" U 0° 40' 42" U 0° 40' 42" U	104° 02' 28" T 104° 08' 35" T 104° 10' 16" T 104° 01' 26" T
5	Karimun	Perairan Selat Durian	UPT Wilayah I Kota Batam	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	1 2 3	1° 02' 52" U 0° 57' 05" U 1° 00' 59" U	103° 34' 22" T 103° 35' 46" T 103° 38' 21" T
6	Karimun	Perairan Karimun	UPPD Daerah II Tanjung Balai Karimun	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	1 2 3 4 5	1° 00' 06" U 1° 00' 43" U 1° 02' 59" U 1° 05' 53" U 1° 07' 48" U	103° 30' 19" T 103° 32' 02" T 103° 32' 03" T 103° 30' 01" T 103° 26' 21" T

					6	1° 05' 57" U	103°24' 27" T
7	Karimun	Perairan Meral Karimun	UPPD Daerah II Kab. Karimun	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	1 2 3 4 5 6 7 8	1° 01' 51,27" U 1° 01' 51,38" U 1° 00' 00,79" U 1° 00' 00,00" U 0° 59' 30,31" U 0° 59' 30,00" U 0° 59' 44,99" U 0° 59' 45,00" U	103° 17' 14,38" T 103° 18' 45,85" T 103° 20' 00,19" T 103° 18' 25,98" T 103° 18' 35,98" T 103° 17' 58,70" T 103° 17' 58,70" T 103° 17' 14,53" T
8	Bintan	Perairan Utara Tanjung Berakit	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	UPP Kelas I Tanjung Uban	1 2 3 4 5 6 7	1° 21' 36,89"U 1° 20' 58,50"U 1° 21' 43,52"U 1° 21' 39,49"U 1° 24' 38,18"U 1° 30' 41,16"U 1° 24' 31,79"U	104° 36' 24,40" T 104° 41' 24,26" T 104° 44' 52,13" T 104° 47' 14,78" T 104° 49' 04,05" T 104° 44' 04,70" T 104° 41' 07,23" T
9	Bintan	Perairan Timur Tanjung Berakit	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	UPP Kelas I Tanjung Uban	1 2 3 4 5 6	1° 13' 59,33"U 1° 10' 56,47"U 1° 06' 38,76"U 1° 05' 51,71"U 1° 10' 35,09"U 1° 12' 09,19"U	104° 40' 24,90" T 104° 45' 22,24" T 104° 51' 28,02" T 104° 51' 08,77" T 104° 41' 05,54" T 104° 39' 35,70" T
10	Bintan	Perairan Telang	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	UPP Kelas I Tanjung Uban	1 2 3 4	0° 44' 05" U 0° 43' 55" U 0° 40' 24" U 0° 40' 09" U	104° 31' 10" T 104° 34' 46" T 104° 34' 41" T 104° 31' 26" T
11	Bintan	Perairan Telang	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	UPP Kelas I Tanjung Uban	1 2 3	0° 35' 05" U 0° 36' 23" U 0° 30' 48" U	104° 32' 58" T 104° 40' 20" T 104° 39' 55" T

12	Tanjungpinang	Perairan Pulau Sore	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas I Tanjungpinang	1 2 3	0° 53' 34" U 0° 53' 48" U 0° 52' 57" U	104° 22' 46" T 104° 23' 09" T 104° 23' 41" T
13	Tanjungpinang	Perairan Pulau Penyengat	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas I Tanjungpinang	1 2 3 4	0° 56' 03" U 0° 56' 04" U 0° 56' 15" U 0° 56' 15" U	104° 24' 28" T 104° 24' 52" T 104° 24' 53" T 104° 24' 27" T
14	Tanjungpinang	Perairan Pulau Terkulai	UPPD Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	KSOP Kelas I Tanjungpinang	1 2 3 4	0° 55' 47" U 0° 56' 03" U 0° 56' 33" U 0° 56' 03" U	104° 23' 25" T 104° 23' 27" T 104° 22' 04" T 104° 21' 58" T
15	Natuna	Perairan Pulau Lagong	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	1 2 3 4 5 6	3° 37' 06" U 3° 38' 57" U 3° 36' 12" U 3° 31' 33" U 3° 33' 57" U 3° 35' 55" U	108° 09' 22" T 108° 17' 24" T 108° 19' 17" T 108° 07' 45" T 108° 06' 43" T 108° 10' 05" T
16	Natuna	Perairan Pulau Sedanau	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	1 2 3 4	3° 48' 17" U 3° 50' 24" U 3° 52' 43" U 3° 50' 50" U	107° 55' 59" T 108° 00' 17" T 107° 58' 41" T 107° 53' 59" T
17	Natuna	Perairan Pulau Selaut	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	1 2 3 4	3° 55' 54" U 3° 57' 05" U 3° 59' 52" U 4° 00' 56" U	107° 52' 48" T 107° 57' 56" T 107° 57' 06" T 107° 51' 46" T

18	Kepulauan Anambas	Perairan Utara Pulau Jemaja	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	1 2 3 4	2° 59' 15" U 3° 00' 41" U 3° 02' 10" U 3° 00' 46" U	105° 46' 38" T 105° 48' 18" T 105° 46' 08" T 105° 44' 49" T
19	Kepulauan Anambas	Perairan Selatan Pulau Mubur	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	1 2 3	3° 16' 52" U 3° 15' 20" U 3° 17' 16" U	106° 11' 08" T 106° 13' 29" T 106° 13' 13" T
20	Kepulauan Anambas	Perairan Selatan Pulau Mubur	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	1 2 3	3° 16' 28" U 3° 15' 47" U 3° 15' 47" U	106° 10' 32" T 106° 10' 37" T 106° 11' 41" T
21	Kepulauan Anambas	Perairan Utara Pulau Siantan	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	1 2 3 4	3° 15' 17" U 3° 14' 08" U 3° 14' 35" U 3° 15' 54" U	106° 10' 35" T 106° 10' 40" T 106° 12' 57" T 106° 13' 06" T
22	Kepulauan Anambas	Perairan Utara Pulau Matak	UPPD Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	UPP Kelas II Tarempa	1 2 3 4	3° 22' 34" U 3° 23' 09" U 3° 23' 56" U 3° 23' 31" U	106° 15' 31" T 106° 16' 20" T 106° 15' 44" T 106° 14' 57" T

